



Bupati Buka Rapat Pengawasan APIP

► Perwakilan KPK Didaulat Memberikan Materi



Martin Rantan
Bupati Ketapang

Ini cambuk untuk terus melakukan peningkatan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tuntas dan konsisten baik pemeriksaan internal maupun eksternal

KETAPANG, SP - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Gelar Pengawasan Daerah dan Pemuktahiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Ketapang, Rabu (16/10). Kegiatan dihadiri seluruh kepala Desa dan kepala dinas serta Koordinator Wilayah Kalbar Bidang Pencegahan KPK sebagai narasumber kegiatan.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, mewajibkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pemuktahiran data dan tindak lanjut hasil pengawasan

setiap tahun.

“Yang ingin diraih dari kegiatan ini membangun persepsi yang sama dari para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan komitmen penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” kata Martin.

Kata Martin, APIP sebagai komponen lingkungan pengendalian, sangat penting dalam menjamin efektivitas pengendalian internal, tata kelola dan manajemen risiko.

Paradigma APIP sekarang bukan lagi sebagai *watchdog*, tetapi lebih bersifat *partnership* melalui kegiatan *quality assurance* dan *consulting* dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan daerah agar berjalan lebih akuntabel, sejak



dari perencanaan sampai pertanggung jawaban.

“Dalam makna yang baru, pengawasan internal tidak hanya membantu mengawasi pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya, namun juga memberikan jasa konsultasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta mampu mengidentifikasi trend atau perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi,” jelas Martin.

Laporan keuangan Pemkab Ketapang sejak 2015 selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repub-

lik Indonesia. Capaian ini menurut Martin tentunya patut disyukuri namun bukan berarti untuk berpuas diri.

“Ini cambuk untuk terus melakukan peningkatan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tuntas dan konsisten baik pemeriksaan internal maupun eksternal,” tutur Martin.

Koordinator Bidang Pencegahan KPK Wilayah Kalbar, Sugeng Basuki mengatakan transparansi tata kelola dana desa sangat diperlukan peran dari APIP.

“APIP sebagai pengawas saat ini peranannya lebih kepada *partnership*, artinya

APIP akan mendampingi khususnya terkait Dana Desa baik kepada Kades, Camat dan *stakeholder* terkait dalam hal aturan,” katanya.

Ia mengaku, KPK telah melakukan koordinasi dengan APIP, misalkan terkait pengaduan, sehingga APIP bisa melakukan pengecekan terlebih APIP telah memiliki jaringan di tingkat desa.

“Yang jelas kita mengimbau agar pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana desa harus transparan, melakukan kegiatan-kegiatan sesuai arturan dan tidak sungkan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai Dana Desa,” katanya. **(teo/pk/jee)**

